Jurnal Ekologi Birokrasi

Volume 12 Nomor 2 2024

ISSN Print 2338-075X ISSN Online 2654-7864



Keladi-Sagu, Si-Ipar: Implementasi Kebijakan Binmas Noken di Kota Jayapura

Piter Kendek *, Akbar Silo

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia *E-mail Korespondensi Penulis: piterkendek75@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Implementation, Policy, Binmas Noken, Jayapura, Papua

How to Cite:

Kendek, P. Silo, A. (2024). Implementasi Kebijakan Binmas Noken di Wilayah Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(2): 98-113.

DOI:

10.31957/jeb.v12i2.4132

ABSTRACT

This article discusses the implementation of the BINMAS Noken policy in Jayapura City, focusing on the factors that support or hinder its effectiveness. The research method used is descriptive qualitative, with data collected through interviews and observations. The analysis process includes data reduction, presentation, and conclusion drawing. The study found that the implementation of BINMAS Noken in Jayapura City consists of two programs: Si-Ipar, which focuses on "Polisi pi Ajar" (Police teaching the kids), and Keladi-Sagu, which "Kesehatan Lambang Diri Sehat Guna" (promotes self-use of health symbols). The communication aspect involves structured distribution with inter-agency coordination, utilizing social media as a communication medium both internally and with the community. The program also involves the Binmas apparatus and supporting resources. The task force receives incentives to enhance performance and demonstrates consistency and commitment to the program. The bureaucratic structure follows standard operating procedures. Internal supporting factors include high motivation and enthusiasm for work, as well as incentives for task force personnel. Externally, the local government is supportive, collaborating in program preparation and implementation. However, there are internal inhibiting factors such as personnel with double duties and inadequate logistical support, resulting in delays. Externally, community participation is limited due to a lack of motivation and involvement.

Copyright © 2024 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Implementasi, Kebijakan, Binmas Noken, Jayapura, Papua

Cara Mengutip:

Kendek, P. Silo, A. (2024x). Implementasi Kebijakan Binmas Noken di Wilayah Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(2): 98-113.

DOI:

10.31957/jeb.v12i2.4132

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang implementasi kebijakan BINMAS Noken di Kota Jayapura dengan fokus pada faktorfaktor yang mendukung maupun menghambat efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BINMAS Noken di Kota Jayapura terdiri dari dua program, yaitu Si-Ipar yang berfokus pada Polisi pi Ajar dan Keladi-Sagu yang berfokus pada Kesehatan Lambang Diri Sehat Guna. Aspek komunikasi meliputi penyaluran terstruktur dengan koordinasi antar instansi, pemanfaatan media sosial sebagai media komunikasi baik internal maupun dengan masyarakat. Program ini juga melibatkan aparatur Binmas dan sumber daya pendukung. Satgas mendapatkan insentif untuk meningkatkan kinerja dan menunjukkan konsistensi serta komitmen terhadap program. Struktur birokrasi mengikuti prosedur operasi standar. Faktor pendukung internal meliputi motivasi dan semangat kerja yang tinggi, serta insentif bagi personel satgas. Secara eksternal, pemerintah daerah mendukung dan turut serta dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Namun, terdapat faktor penghambat internal seperti personel yang memiliki tugas ganda dan dukungan logistik yang kurang memadai, sehingga mengakibatkan keterlambatan. Secara eksternal, partisipasi masyarakat terbatas karena kurangnya motivasi dan keterlibatan.

Hak Cipta© 2024 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maka dapat ditarik pemahaman, bahwa hukum kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Danendra, 2013). Struktur organisasi Kepolisian dapat dipahami sebagai suatu susunan atau bangunan dari organisasi kepolisian untuk mencapai suatu tujuan. Susunan tersebut diatur secara berjenjang yang terdiridari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi.

Kepolisian sebagaimana terdapat didalam Pasal 1 (ayat 5 dan 6), Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat Negara yang berperan dalam memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polres sebagai Basis Deteksi dan Basis Solusi belum bisa terlaksana dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih enggannya masyarakat untuk bekerjasama dengan Polisi dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan Kamtibmas, masih seringnya muncul gejolak di masyarakat secara tiba-tiba yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya di tingkat Polsek, dan masih banyak penanganan masalah Kamtibmas yang harus dilakukan di tingkat Polres karena Polres mampu menangani kendati masalah tersebut sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat Polsek (Priyatna, 2018; Daradjat, 2015).

Dalam pelaksanaannya agar Polres mampu dan dapat mewujudkan dengan indikator sebagai basis deteksi maupun basis solusi, di lapangan akan diperankan oleh Unit Binmas di Polsek-Polsek untuk pembinaan pada masyarakat. harapannya setiap permasalahan Kamtibmas harus sudah terdeteksi secara dini di tingkat Polres sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif dan kalaupun permasalahan benar-benar harus terjadi maka dampak yang ditimbulkan dapat dieliminir di tingkat lokal, namun kenyataan yang terjadi justru berbicara sebaliknya permasalahan diketahui dan diantisipasi setelah membesar di tingkat regional dan nasional, terliput media dan menjadi perhatian publik bahkan semakin tidak terkendali yang akhirnya harus menimbulkan korban jiwa dan harta benda lebih besar yang pada muaranya makin memperburuk citra dan kredibilitas Polri di mata publik (Aryana, 2017; Damayanti, dkk, 2013).

Pengemban Binmas bertugas menggugah perhatian masyarakat untuk menanamkan pengertian sehingga melahirkan sikap penerimaan terhadap upaya-upaya Polri dalam pembinaan sistem keamanan dan ketertiban, dan selanjutnya mendorong masyarakat untuk sadar dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta normanorma sosial yang hidup di masyarakat dan pada akhirnya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kamtibmas (Saputra, 2023; Sianturi & Hanita, 2020).

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, unit Binmas pada Polri berperan, memiliki beberapa peran, yakni *pertama* pengendali masyarakat, dalam pelaksanaan peran ini Polri mengarahkan sekaligus mengawasi kegiatan masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang berlaku bekerja dengan baik dan berfungsi efektif mengatur dan menertibkan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Kedua Pengarah dan penggerak masyarakat, dalam peran ini unit Binmas Polri mendorong dan membimbing masyarakat menyesuaikan diri menghadapi perubahanperubahan yang terjadi sesuai dengan kebijakan-kebijakan pembangunan negara dan pemerintah. Polri menggerakkan masyarakat melakukan upaya-upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban sehingga pembangunan berjalan lancar. *Ketiga*, pemberdaya potensi masyarakat, dalam peran ini Polri memperkuat dan memperteguh semangat masyarakat mewujudkan kesejahteraan, dengan cara memberi petunjuk, arah, bimbingan dan pelatihan tentang upaya-upaya pencegahan dan cara mengatasi gangguan kamtibmas. Polri memberi perlindungan dengan menjaga hak-hak azasi tiap individu. Hak-hak politik, jiwa raga dan hak milik warga masyarakat (Patiran, dkk, 2022; Sianturi & Hanita, 2020).

Pada Konteks Papua sendiri, dalam menjalankan fungsi unit Binmas, dibuat kebijakan Binmas Noken. Adanya program Binmas Noken sebagai implementasi pendekatan atau interaksi yang sangat efektif bagi Polda Papua kepada masyarakatnya adalah pendekatan secara manusiawi atau *Soft Approach Policing* dan dalam implementasinya. secara konsep teknis operasionalisasi dirangkum dalam program-

program dengan jargon lokal, yakni Kesejahteraan Untuk Anak Negeri (Kasuari), Komunikasi Tokoh Elit Kamtibmas (Koteka), Polisi Pi Ajar (Si Ipar), Peduli Kamtibmas (Peka), Millennial Torang Maju (Matoa), Pemuda Pemudi Cendikia (Papeda) dan Torang Insan Faham Adat Masdarwis (TIFA). Keseluruhan konsep operasionalisasi Binmas Noken ini diharapkan dapat menjadi solusi yang sesuai dalam menentukan peranan Polri dalam berkontribusi dalam percepatan pembangunan Papua dengan cara to win the hearts and mind the people of Papua (Thamrin & Perdini, 2022; Rahmawati, 2021; Sianturi & Hanita, 2020).

Jadi, Binmas Noken merupakan program terapan dari program Polri sebelumnya yang juga bertujuan untuk membantu kehidupan masyarakat Papua, yakni Binmas Teritorial, dan Binmas Pioneer. Sedangkan secara filosophy Noken merupakan kantong besar bagi orang asli Papua yang berfungsi untuk menampung aspirasi, usulan, maupun keluhan warga Papua untuk dicarikan solusinya (Sudarto, 2022). Olehnya, berdasarkan seluruh uraian tersebut, pada artikel ini memfokuskan pembahasan pada dual hal yakni pertama ingin melihat implementasi program Binmas Noken di Kota Jayapura. Kemudian menyelami apa saja dukungan dan hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan yang lebih optimal di masa yang akan datang.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mendalami dan menganalisis terkait dengan implementasi Kebijakan BINMAS Noken sebagai sebuah fenomena kebijakan publik di Kota Jayapura. Fokus penelitian ini menyoroti implementasi Kebijakan BINMAS Noken beserta faktor pendukung dan Penghambatnya di Kota Jayapura. Alat pendukung yang digunakan selama penelitian adalah pedoman wawancara dan alat perekam untuk membantu peneliti dalam mendapatkan dan mengumpulkan data. Informan penelitian yang dilibatkan diadasari kategori dari aparatur Kepolisian yang bertugas dalam menjalanakan kebijakan BINMAS Noken, dan Masyarakat. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan kategorisasi informan yang telah dibuat. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara mendalam, Observasi dan dokumentasi. Lalu analisis data meliputi, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Moleong, 2009).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kebijakan Satgas Binmas Noken di Kota Jayapura

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Binmas Noken merujuk pada sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi

Papua & Papua Barat; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:, sedangkan regulasi secara teknis berlandaskan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem, Manajemen dan Standar keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang didalamnya berisi tujuan untuk memberikan dukungan pengamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan dasar dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan negara, dan pulau-pulau kecil dan komunitas adat terpencil; dan membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok strategis Papua dalam mewujudkan pendekatan dan kebijakan pembangunan yang tepat.

Satgas Binmas Noken merupakan salah satu wadah untuk mendekatkan sekaligus menjadi tempat berkeluhnya masyarakat agar masyarakat semakin percaya terhadap keberadaan polisi sebagai pelayan masyarakat, untuk lebih banyak mendengar permintaan, keinginan, dan harapan masyarakat Papua khususnya yang ada di kota jayapura. Implementasi Satgas Binmas Noken di Kota Jayapura terdiri dari beberapa giat:

Pertama, Tahun 2021 "Operasi Nemangkawi" satuan tugas (satgas) Binmas Noken Program Kasuari (Kesejahteraan untuk anak negeri). Papua memiliki sumber kesejahteraan lain dari pertambangan yang bersifat berkelanjutan, sumber daya alam Non Tambang seperti Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan yang dapat dijual dalam bentuk komunitas bukan produk olahan sehingga belum bisa memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya Binmas Noken Program Kasuari Khusus Kota Jayapura menitik beratkan pada sektor Pertanian, Peternakan Perikanan, Perkebunan, yang bertujuan bukan hanya menambah kuantitas atau jumlah produksi, namun dapat menghasilkan perubahan sosial baik norma perilaku dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua yang ada berdomisilih di kota Jayapura

Kedua, Tahun 2022 "Operasi Damai Cartenz "Satuan Tugas (Satgas) Binmas Noken Program Koteka (Komunitas toko elit kamtibmas). Komunikasi adalah cara untuk dapat menjalin hubungan emosional yang cukup dalam antara Polri dengan tokoh yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga ada karya yang dapat diberikan kepada Masyarakat dalam kontribusi membangun Papua. Melalui Komunikasi dan dialog dengan Tokoh-tokoh elit Kamtibmas Papua, diharapkan kondisi kota Jayapura tetap kondusif dalam kontribusi membangun Papua. Program Koteka Binmas Noken melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan.

Ketiga, Tahun 2023 "Operasi RASAKA Cartez" Satuan Tugas (Satgas) Binmas Noken yang teridiri dari beberapa program seperti Si-Ipar (Polisi Pi Ajar), Polisi Pi Ajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dengan menambah Masyarakat yang mampu baca tulis, menunjang pendidikan dasar dengan secara langsung berperan sebagai tenaga pengajar/guru di pusat kegiatan belajar, menghadirkan figur instruktur maupun pelatih, membuat aktifitas yang menyenangkan bagi anak-anak untuk meningkatkan minat baca, menulis dan menghitung. Cara bertindak yang dilakukan adalah dengan mekanisme Tatap muka secara langsung dengan anak didik didukung sarana belajar (alat tulis dan alat peraga). Sasaran anak didik berumur 6-12 tahun (usia produktif wajib belajar) diperuntukan

bagi anak yang putus sekolah dan tidak mampuh. Dan anak- anak yang sudah berumur 12 tahun kertas tetapi tidak dapat melanjutkan sekolah dengan latar belakang orang tua tidak mampu, anak-anak yang sudah tidak ada orang tuanya atau dan kurang perhatian dari keluarga .Data sasaran (anak didik) tidak berubah sampai dengan pelaksanaan operasi selesai. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan pemerintahan setempat. Lokasi kegiatan belajar mengajar di sesuaikan dengan kondisi di lapangan tempat yang dianggap layak (balai kampung / tempat atau kediaman masyarakat. Kemudian, Keladi Sagu (Kesehatan Lambang Diri sehat Guna), Kersehatan merupakan salah satu faktor terpenting sebagai syarat untuk memajukan kehidupan suatu bangsa termasuk wilayah Papua. Banyak wilayah di Papua termasuk kota Jayapura yang tingkat kesehatannya masih rendah, belum lagi beberapa peristiwa kriminal yang terjadi di wilayah papua terhadap tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal bersenjata, beberapa wilayah di papua termasuk kota Jayapura yang belum maksimal pelayanan kesehatan. Polri harus mampu menjawab tantangan ini sehingga mampu menghadirkan tenaga kesehatan pada wilayah-wilayah yang membutuhkan kehadiran tenaga kesehatan. Keladi sagu melakukan pengobatan terhadap masyarakat yang tidak/kurang tersentuh pelayanan kesehatan antara lain; Stunting, Malaria, Inspa dan penyakit kulit.

Hasil dari kegiatan ini , pada tahun 2021 "Operasi Nemangkawi "Satuan tugas Binmas Noken melaksanakan kegiatan Program Kasuari yang meliputi : bidang Pertanian, Melakukan Pendapingan dan pemberian bibit tanaman Jagung, Kacang tanah, Kacang Panjang kepada Masayarakat orang Asli Papua untuk bercocok tanam berupa Tanaman Jagung seluas ¼ Ha Atas Nama Wiliam Enumbi berlokasi di Koya tengah distrik Muara tami; Tanaman Jagung Seluas ¼ Ha Atas Nama Eranus berlokasi di kampung Koya Mosso; Tanaman Kacang tanah seluas 1/8 Ha Atas Nama Wilian Enumbi berlokasi di koya tengah Distrik Muara Tami; Tanaman Kacang Panjang seluas 1/8 Ha Atas Nama Eranus berlokasi di Kampung Koya Mosso. Lalu, pada bidang perikanan, melakukan pemeliharaan Ikan Nila sebanyak 500 ekor dengan luas Kolam ¼ Ha Atas Nama Pardi di koya timur Distrik Muara Tami. Kemudian Peternakan, memberikan bibit ternak babi 3 pasang yaitu Kepada Bapak Wilian Enumbi, 1 Pasang (jantan dan Betina), Kepada Bapak Eranus 1 pasang (jantan dan betina), dan Kepada Bapak Salmon 1 pasang (jantan dan betina).

Tahun 2022" Operasi Damai Cartenz" satuan tugas Binmas Noken melaksanakan. Program Koteka (Komunitas Elit Tokoh Kamtibmas) dengan menyambangi dan melakukan pembinaan dan penyuluhan Kamtibmas kepada Tokoh agama, tokoh Adat, tokoh Masyarakay sebanyak 43 tokoh yang Pro NKRI dan 5 Tokoh yang Kontra NKRI. Pada Tahun 2023 "Operasi Rasaka Cartenz" Satuan Binmas Noken melaksanakan beberapa program, yakni *pertama*, Si-Ipar yang bertujuan untuk Memberikan kebutuhan dasar dan pelayanan pendidikan di wilayah operasi dengan cara bertindak sebagai berikut:

- a. memetakan kembali sasaran masyarakat OAP yang membutuhkan layanan kebutuhan dasar dan pendidikan;
- b. melakukan klasterisasi masyarakat terhadap prioritas kebutuhan pendidikan;
- c. penetapan sasaran orang, benda, tempat serta kegiatan yang akan dilakukan pada program Si-lpar;
- d. membuat rencana kegiatan dan distribusi sarana kontak pendidikan sesuai dengan prioritas;
- e. melaksanakan kegiatan dan distribusi sarana kontak sesuai jadwal;

- f. melakukan kegiatan pengajaran kepada masyarakat yang menjadi sasaran Siipar
- g. melakukan pemantauan progres perkembangan sasaran program Si-par
- h. melakukan Anev atas capaian hasil Si-par
- i. melaporkan hasil capaian kepada Kasatgas dan Kasatgas kepada Kaops;
- j. melakukan koordinasi kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.

Indikator Keberhasilan Program Si-Ipar adalah pada Tahap 1, mengenal huruf Alfabet, dan mampu membaca dengan lancar, Tahap 2(Mampu menulis dengan benar dan tulisan dapat dibaca, Tahap 3 (mengenal angka-angka dan mampu menghitung dengar benar), Tahap 4 (Mengenal wawasan Kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia) antara lain bendera merah putih, Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Tahap 5 (Mampu mengikuti ujian dan lulus mendapatkan ijazah paket A.

Kemudian, program berikutnya adalah Keladi Sagu, yang memiliki tujuan untuk melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan dengan pemeriksaan kesehatan keliling, membantu pelayanan Kesehatan antara lain Stunting, Malaria, Ispa dan Penyakit Kulit baik secara door to door system, serta pengobatan dengan pemberian obat gratis dengan cara bertindak sebagai berikut:

- a. Memetakan kembali sasaran masyarakat OAP yang membutuhkan pelayanan kesehatan:
- b. Melakukan klasterisasi masyarakat terhadap prioritas kebutuhan kesehatan;
- c. Penetapan sasaran orang, benda, tempat serta kegiatan yang akan dilakukan pada program Keladi Sagu;
- d. Membuat rencana kegiatan dan distribusi sarana kontak kesehatan sesuai dengan prioritas;
- e. Melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota Jayapura terkait pelayanan kesehatan seperti Stunting, Inspa, Malaria, dan Penyakit Kulit dan pelayan obat-obatan secara gratis

Indikator Keberhasilan Keberhasilan Keladi-Sagu adalah Masyarakat Penderita Penyakit stunting, Malaria, Inspa dan penyakit kulit dapat di sembuhkan, Tenaga Kesehatan Polri dapat Melakukan pelayanan kesehatan tepat dengan sasaran, Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Kesehatan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, Terlaksananya Sinergitas yang baik antara tenaga Kesehatan Polri dengan tenaga kresehatan Pemerintah daerah.

4.2. Implementasi Kebijakan Binmas Noken di Kota Jayapura

Dengan adanya kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan organisasi daerah, maka penulis menjelaskan dan menggambarkan Implementasi Kebijakan Binmas Noken di Kota Jayapura dengan menggunakan model implementasi kebijakan George Edward III (Nugroho, 2004; Winarno, 2002; Dunn, 1994). Menurut model tersebut, implementasi kabijakan ini dapat dijabarkan melalui faktor-faktor sebagai berikut.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Anderson (1978:25) mengemukakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah aplikasi sistem administratif pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian Edwards III (dalam Winarno, 2014) menjelaskan bahwa: "implementasi kebijakan adalah tahapan

pembuatan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan dan konsekuensi kebijakan tersebut bagi orang-orang yang terkena dampaknya." Berdasakan penjelasan di atas, Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya. Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan oleh Wahab (2008:51), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan.

Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, munkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

4.2.1. Komunikasi

Dalam penyaluran informasi kebijakan, harus terjain komunikasi yang baik, sebagai mekanisme transmisi atau pola komunikasi kebijakan para pelaksana. Komunikasi tersebar sesuai dengan perintah kebijakan, termasuk yang bersangkutan dengan sumberdaya, (Nugroho, 2003). Menurut Agustino (2006:157), komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengkur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miss komunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Dalam Penyaluran informasi Tentang Satuan tugas Binmas noken yang ada di wilayah kota jayapura, menggunakan Media Sosial, baik melalui

IG, Telegram, Whap App, Facebook dan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) bahkan melalui Sambang dan Penyuluhan Bhabinkamtibmas untuk melakukan sosialisasi dan Pendataan

Kemudian, Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Terkait dengan konsistensi, Polres atau yang ada di kota Jayapura belum maksimal/ tidak berjalan kerena Kebijakan Pimpinan Level Polresta dalam hal ini Kapolresta selaku pimpinan kurang mendukung bahkan cenderung menganggap kurang berdampak, sehingga personil Polresta yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Satgas binmas noken mengalami kendala. Dengan kata lain antara pimpinan dan personil satgas binmas noken tidak searah

4.1.2. Sumber Daya

Edwards III (dalam Winarno, 2014) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : "Staf, informasi, otoritas, fasilitas; gedung, perlengkapan, tanah dan perbekalan". Edward III (dalam Winarno, 2014) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; "Sumber daya yang tidak mencukupi berarti bahwa undang-undang tidak akan ditegakkan, layanan tidak akan disediakan, dan regulasi yang wajar tidak akan dikembangkan".

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi" (Tachjan, 2006:135).

Sumber daya berhubungan dengan dukungan pelaksanaan kebijakan, (Nugroho, 2003). Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (resources). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (dalam Winarno, 2014) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "Informasi, Material, Peralatan, Fasilitas, Uang, Orang atau manusia". Sementara Hodge (dalam Winarno, 2014) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "Sumber daya manusia, sumber daya material, sumber keuangan dan sumber informasi". Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: "Sumber daya manusia dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara; untuk memperlihatkan jumlah personalia yang dilibatkan". Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: "Sumber daya material - perlengkapan, gedung, fasilitas, material, kantor, perlengkapan, dll". Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: "Sumber daya keuangan tunai di tangan, pembiayaan hutang, investasi pemilik, pendapatan penjualan, dll ". Sumber daya informasi dibagi menjadi: "Data sumber daya-historis, proyektif, biaya, pendapatan, data ketenagakerjaan dan lain-lain". Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

Pertama Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup

memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Sumber daya manusia yang dilibatkan dalam mengimplementasikan kebijakan satgas Binmas Noken antara lain Personil yang terlibat dalam Satuan Tugas Binmas Noken adalah Personil terlah mahir di bidang tugas masing-masing-masing-masing, seperti Kasubsagas adalah Personil Polri yang bertugas Sebagai Wakil Kepala Kepolisian resor kota jayapura, dengan Latar belakang pendidikan S2; kemudian Kasat Binmas (Si-Ipar) adalah Personil Polri yang bertugas sebagai Kepala Satuan Binmas di Polresta Jayapura Kota dengan latar belakang pendidikan S2, sedangkan Personil yang Di libatkan dalam kegiatan Si-Ipar adalah personil Polri yang setiap hari bertugas di fungsi Binmas dengan latar belakang pendidikan, S1 dan SMU; serta Kasindokes (Keladi Sagu) Polresta adalah personil Polresta yang bertugas di bidang Medis dengan latar belakang pendidikan D3 Keperatatan, dan personil Polri lainnya adalah 1 adalah dokter Umum Pegawai Sipil Polri, 1 Bintara D3 Keperawatan.

Sumber Daya Manuasia peserta didik baik anak usia 6-12 tahun sangat antusias dan bersemangatdaloam mengikuti pelajaran , demikian pula anak usia 12 tahun kertas semangat belajar masih tinggi. Sedangkan para pengajar /personil Polresta yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Si-Ipar siap dan mampu menyesuaikan dimana para pengajar sebelumnya telah di beri ketrampilan / pelatihan untuk mendidik dan mengajar anak-anak yang putus sekolah. Sedangkan untuk kegiatan Keladi Sagu adalah personil Polresta yang memiliki latar belang pendidikan umum dan berprofesi sebagai tenaga Medis tidak mengalami kendala.

Kedua, Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Adapun Penunjang Sarana dan Prasarana, pada kegiatan Si-Ipar (Polisi Pi ajar) dalam melaksanakan kegiatannya di lengkapi oleh 1 Buah Mobil Grand Merk (mobil dinas Polri) dan masing-masing-anak didik di lengkapi fasilitas belajar mengajarnya berupa Tas sekolah, Buku Tulis, buku mewarnai, Baju kaos /seragam serta Pensil, penghapus, serutan. Kegiatan belajar mengajar/tatap muka di lakukan setiap hari bagi anak yang berusia 6-12 tahun. Bagi anak yang umurnya lebih dari 12 tahun ke atas di lakukan pendampingan untuk di arahkan ke PKBM (Pusat kegiatan Belajar Mengajar) untuk Paket Kesetaraan baik paket A, Paket B, Paket C.

Kemudian, pada kegiatan Keladi-sagu (Kesehatan lambang diri sehat guna) dalam kegiatannya di lengkapi oleh 1 unit mobil Ambulan (mobil dinas Polri) lengkap dengan peralatan medis serta serta obat-obatan. Dalam kegiatan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat maka target yang di berikan adalah masyarakat yang berdampak Stunting, sebanyak 110 orang, malaria sebanyak 1.650, Inspa 2.420 orang dan penyakit kulit sebanyak 330 orang. Sumber daya Penunjang dalam implementasi Kebijakan Satgas Binmas Noken, secara umum sangat terbatas namun pada dasarnya kegiatan SI-Ipar dan Kegiatan Keladi Sagu berjalan dengan lancar wau pun masih terdapat kendala-kendala.

Dengan demikian, efektivitas Kondisi lingkungan dalam Implementasi Satgas Binmas noken baik pada giat Si-Ipar maupun Keladi Sagu, memiliki tantangan tersendiri dari Kegiatan SI-Ipar pada awal-awal untuk menghadirkan peserta didik sangat sulit karena lingkungan anak-anak yang telah terkontaminasi dengan

lingkungan orang Dewasa yang tidak bekerja, sehinga untuk melangkah maju dan mengerjakan anak-anak didik yang putus sekolah menggunakan pola Pendekatan Kesejahteraan, dengan cara anak-anak yang akan kita didik selesai belajar akan di beri Snack dan minuman, Sehingga anak-anak yang tadinya ragu menjadi semangat dan berlimpah-limpah untuk mengikuti kegiatan SI-Ipar. Untuk kondisi keluarga pada awal-awal orang tua tidak setuju dengan alasan bahwa polisi tidak punya kopetensi untuk mendidik anak-anak yang telah putus sekolah, namun seiringnya waktu, maka orang tua/ wali dari anak-anak mulai bersemangat untuk mendorong anak-anaknya mengikuti kegiatan belajar. Lalu kegiatan Keladi Sagu untuk pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami kendala yang serius karena masyarakat melihat secara langsung personil Polresta datang dengan mobil Ambulans lengkap dengan peralatan medis, sehingga masyarakat sangat senang dan berterima kasih atas bantuan pengabaran yang dilakukan secara Garatis.

4.2.3. Disposisi

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006:162): sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Menurut Edward III dalam Winarno (2014:142-143) mengemukakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya. Faktorfaktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

Pertama, Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Kedua, Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor

pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Bentuk upaya menggerakkan / pemberian insentif sangat baik kepada personil yang terlibat (namanamanya telah di sprinkan) untuk melaksnakan giat Binmas Noken dengan kata lain Kompensasi yang diberikan/ insentif sangat mendukung atau lebih dari Cukup.

Disposisi diartikan sebagai komitmen pelaksana kebijakan untuk menyelesaikan hal yang menjadi perintah kebijakan, (Nugroho, 2003). Disposisi menentukan rentang keselarasan antara harapan perancang kebijakan dengan tindakan pelaksana. Olehnya disposisi sangat berhubungan dengan sikap pelaksana kebijakan dan bentuk upaya untuk menggerakkan (manipulasi insentif). Mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan.

4.2.4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu: Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).

Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.

Berdasakan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2014:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi".

Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno, 2014:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasakan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2014:152) menjelaskan bahwa "SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar

kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini. Terkait dengan struktur birokrasi yang di dalamnya terdapat indikator yang SOP (Standart Operasional Prosedur) dan pembagian dan penyebaran tanggung jawab.

Proses Fragmentasi (penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan) Implementasi Kebijakan Satgas binmas Noken di Kota Jayapura adalah Kasub satgas Binmas Noken penanganggungb jawabnya adalah WAKA Polresta Jayapura Kota yang Membawahi 3 Kordinator Subsatgas. Kemudian Kordinator Binmas Noken (Si-Ipar dan Keladi Sagu) adalah Kasat Binmas Polresta Jayapura Kota. Lalu Personil Kegiatan Si-Ipar terdiri dari 1 Perwira dan 4 Bintara, dari Fungsi Binmas.

Uraian Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Tugas dann tanggung jawab; Kasat Binmas memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kepada 4 personil Satgas Binmas noken. 4 Personil Satgas Binmas Noken, memahami dan mengerti tentang tugas-tugas yang akan dilaksanakan mulai dari mempersiapkan sarana dan prasarana berupa Papan White bord standing, spidol, buku bacaan, tas sekolah, Buku tulis, pensil, penghapus dan fasilitas lainnya yang di gunakan saat kegiatan belajar mengajar.

Proses belajar mandiri dilakukan di beberapa titik/lokasi yaitu: Wilayah Distrik heram ada 3 Lokasi yang pertama di asrama Balim Yalimo kampung Yoka, di waena Kampung tepatnya dirumah masyarakat, Kelurahan Hedam organda, Wilayah Distrik Abepura kelurahan Abepantai, Wilayah distrik abepura Kampung Koya kosso, dan Jumlah anak yang didik yang sebanyak 30 anak dari target 30 orang, dengan batasan usia 6-12 tahun sebanyak 27 anak, dan usia diatas 12 -15 tahun Sebanyak 7 orang (pendampingan paket kesetaraan A).

4.3. Dukungan dan Hambatan Implementasi Kebijakan BINMAS Noken di Kota Jayapura

4.3.1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam implementasi kebijakan BINMAS Noken adalah dijabarkan berdasarkan dua program utama dalam satgas Binmas Noken, yakni Program Si-Ipar dan Program Keladi-Sagu, yang dilhat dukungan dari sisi internal dan eksternal yang dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, secara internal; pada program Si-Par adalah Motivasi dan semangat personil yang terlibat dalam kegiatan Satgas Binmas Noken sangat tinggi walaupun mendapat tugas ganda, namun tetap semangat; Insentif personil yang terlibat secara langsung /yang mendapatkan Surat Perintah sangat mendukung sehingga memupuk semangat kerja. Kemudian pada program Keladi-sagu adalah Semangat kerja personil satgas Binmas Noken sangat tinggi, karena memiliki fasilitas pendukung seperti Mobil Ambulance dan fasilitas medis yang ada di dalam mobil Ambulance; Insentif yang di berikan kepada Personil yang melaksnakan giat binmas noken sangat mendukung.

Kedua, secara eksternal; pada program Si-Ipar adalah pemerintah Daerah dalam Hal ini Kota jayapura secara khusus Dinas Pendidikan sangat mendukung karena membantu pemerintah daerah untuk mencerdaskan anak-anak putus sekolah. Kemudian, pada Program Keladi-Sagu, Koordinasi dengan pemerintah Daerah dalam

hal ini Dinas Kesehatan Kota jayapura berjalan dengan baik guna mendukung giat dimaksud.

4.3.2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan BINMAS Noken adalah dijabarkan berdasarkan dua program utama dalam satgas Binmas Noken, yakni Program Si-Ipar dan Program Keladi-Sagu, yang dilhat dukungan dari sisi internal dan eksternal yang dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, secara internal; pada program Si-Par adalah Kurang maksimalnya dukungan Pimpinan kesatuan (Kapolres) baik secara moril maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya yang ada di kesatuan, Personil yang di libatkan belum maksimal dalam melaksnakan tugas karena di sebabkan adanya tugas ganda (terlibat dalam tugas lain yang juga di kerjakan selain tugas sebagai Personil Binmas Noken), Fasilitas belajar masih sangat terbatas, Kualitas SDM pengajar belum maksimal, Sistem ANEV yang dilakukan setiap minggu belum maksimal dikarenakan kurang/jarang melihat langsung ke lokasi giat, sehingga kendala-kendala yang dilapangkan belum tersentuh secara maksimal. Kemudian pada program Keladi-sagu adalah Personil yang dilibatkan sudah sesuai dengan kompetensinya, memiliki Latar belakang Tenaga Medis, namun sarana penunjang (obat-obatkan dan Vitamin) belum maksimal/mengalami keterlambatan dalam pendistribusiannya, sehingga waktu dan target yang hasil di capai tidak Maksimal, kemudian kurangnya dukungan Dari Kesatuan dalam hal ini Pimpinan baik secara moril maupun sarana prasarana pendukung lainnya.

Kedua, secara eksternal; pada program Si-Ipar adalah Peserta didik, anak-anak yang didik pada dasarnya anak-anak yang berlatar belakang Keluarga ekonomi yang tidak mampu dan Broken Home sehinga saat belajar kadang tidak bisa hadir setiap hari dengan alasan mencari makan/biaya hidup sehingga tidak bisa maksimal dalam proses pembelajaran, dan lingkungan Anak didik rata-rata lingkungan yang kurang sehat sehingga mempengaruhi motivasi ana- anak didik untuk belajar menjadi berkurang. Kemudian, pada Program Keladi-Sagu, Masyarakat yang akan di beri pengobatan masih belum sepenuhnya untuk hadir dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan kata lain hanya orang-orang tertentu yang pernah ikut itu yang hadir. Serta belum berjalan secara Maksimal Kordinasi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan dinas Kesehatan dan dengan Puskesmas-puskesmas yang ada di kota jayapura.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 program Implementasi Binmas Noken di Kota Jayapura yakni seperti Si-Ipar, yakni polisi pi ajar dan Keladi-Sagu, yakni kesehatan lambang diri sehat guna. Dalam implementasi kebijakan Binmas Noken di Kota Jayapura, Pada aspek Komunikasi, pola penyebarannya dilakukan secara terstruktur dengan adanya kordinasi antar lembaga dan menggunakan media sosial sebagai media komunikasi baik secara internal maupun dengan masyarakat. Pada aspek Sumber daya telah melibatkan aparatur Binmas sebagai satgas dalam program yang terkordinir secara sistematis, dengan melibatkan sumber daya penunjang. Pada Aspek Disposisi, para satgas mendapatkan instentif untuk dapat memacu kinerja mereka, dan bentuk konsistensi dan komitmen para pelaksana kebijakan untuk menjalankan program tersebut. Apsek Struktur Birokrasi proses fragmentasi (penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan)

secara sistematis dan terkordinir berdasarkan SOP yang berlaku dalam menjalankan program-program yang ada.

Faktor yang mendukung dilihat dari sisi internalnya adalah tingginya motiviasi dan semangat kerja serta adanya pemberian insentif kepada personel satgas noken yang menjalankan program tersebut, kemudian dari sisi internalnya pihak pemerintah daerah sangat memberi dukungan dengan membuka kolaborasi dalam persiapan dan pelaksanaan setiap program. Kemudian, Faktor penghambat dari sisi internalnya adalah beberapa personel masih memiliki tugas ganda sehingga tidak terfokus untuk menjalankan program, dukungan untuk peningkatan penyediaan logistic juga masih kurang, sehingga proses pendistribusian mengalami keterlambatan. Kemudian dari sisi eksternalnya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang, sehingga belum memenuhi target sasaran, ditambah kondisi lingkungan masyarakat yang menyebabkan kurangnya motivasi untuk aktif dan terlibat dalam program binmas Noken di Kota Jayapura.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2006). Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Amanah, S., & Farmayanti, N. (2014). *Pemberdayaan sosial petani-nelayan, keunikan agroekosistem, dan daya saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anderson, J. E. (1978). *Public Policy Making*. Second Edition, Chicago, Holt, Rinehart and Winston.
- Aryana, Y. (2017). Peran Fungsi Dan Tugas Binmas Diwilayah Desa Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Tugas Polri (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Damayanti, A., Mukhtar, S., Musoffa, M., & Andriyanto, T. (2013). Pemberdayaan Binter TNI, Binmas Polri dan Pemda dalam Pencegahan Terorisme.
- Danendra, I. B. K. (2013). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4).
- Daradjat, R. S. (2015). Sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat oleh polisi resort kota dalam membentuk sikap masyarakat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(2), 154-172.
- Dunn. W. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Patiran, G., Setyabudi, C. M., & Mayastinasari, V. (2022). To Win The Heart And Mind The People Of Papua: Fungsi Dan Peran Brimob Dalam Operasi Damai Cartenz 2022. *Jurnal Civic Hukum*, 7(2).
- Priyatna, B. (2017). Sinergitas Polres Dengan Dinas Kominfo Dalam Peningkatan Kepedulian Kamtibmas. *Jurnal Sosial Politik Unla*, 22(1), 102-108.

- Rahmawati, L. (2021). Pengamat: Program Binmas Noken Papua harus membumi. Available at: https://www.antaranews.com/berita/2563897/pengamat-program-binmas-noken-papua-harus-membumi, diakses pada tanggal 21 Mei 2023.
- Saputra, A. (2023). Penguatan Peran Pemolisian Masyarakat Dalam Mewujudkan Stabilitas Kamtibmas Bagi Pembangunan Nasional Tahun 2022. *Jurnal Litbang Polri*, 26(1), 1-10.
- Sianturi, B. H., & Hanita, M. (2020). Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. *jurnal keamanan nasional*, 6(1), 73-94.
- Sudarto, E. (2022). Policing in New Normal Era: A Case Study of Binmas Noken in Papua. *International Review of Humanities Studies*, 7(1).
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Truen RTH: Bandung.
- Thamrin, D., & Perdini, T. A. (2022). Police Management Handles The Separatist Movement Of Armed Criminial Group (ACG) In Papua Between 2017-2022. Asia Pacific Journal of Business Economics and Technology, 2(06), 104-116.
- Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.